

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG MOSKONA DI DISTRIK BINTUNI KABUPATEN TELUK BINTUNI¹

Oleh : Penina Yettu. M²

ABSTRAK

Usaha pemerintah pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu masyarakat diharapkan aktif serta dapat meningkatkan pendayagunaan potensi daerahnya secara optimal dan terpadu.

Dari data yang ada selama ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Distrik Bintuni dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah karena pembangunan hanyalah proyek pembangunan yang datang dari pemerintah pusat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sementara tujuan dari pemberian otonomi khusus tersebut, adalah salah satunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat dan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya mempunyai ketrampilan dan dapat mandiri. Demikian juga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung Moskona Distrik Bintuni diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dalam membuat atau memformulasikan rencana pembangunan yang sesuai dengan keinginan mereka. Akibat terlalu besarnya campur tangan dari pemerintah pusat sehingga tujuan tersebut belum tercapai.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, dan Pembangunan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya, sehingga budaya ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab budaya merupakan masalah yang sangat fundamen dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian maka budaya pun sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di Negara kita ini.

Dalam pasal. 18 B UUD 1945 yang telah di amandemen dikemukakan, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang diatur dalam undang-undang. Hal ini diperkuat lagi dengan Undang Undang Otonomi Daerah melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga tepatnya pada tahun 2001 pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. Dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi Propinsi Papua ini, maka jati diri dari orang Papua dapat diperhatikan baik dari berbagai segi, terutama dalam bidang Birokrasi Pemerintahan yang mana tertuang dalam Bab I pasal 1 poin "d" dan "k" yang berbunyi, "pemerintah daerah Propinsi. Papua adalah Gubernur beserta perangkat yang lain

¹ Merupakan Skripsi penulis

² Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

sebagai Badan Eksekutif Propinsi Papua; poin "d" berbunyi Distrik yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Distrik sebagai perangkat kerja Kabupaten atau Kota. Provinsi Papua dengan diberlakukannya otonomi khusus yaitu melalui Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, maka jati diri dari orang Papua dapat diperhatikan dengan baik dari berbagai segi. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus ini, sehingga setiap masyarakat Papua bisa diberdayakan. Tujuan pemberian otonomi itu masih sama, yaitu: "peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis dapat mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :
Bagaimana peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pembangunan Kampung Moskona di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni?

Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :
Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Moskona di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni.

Manfaat Penelitian

- a. Secara ilmiah diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan informasi ilmiah dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan khususnya dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kampung Moskona di Wilayah Distrik.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kampung Moskona Distrik Bintuni dalam penerapan kebijakan untuk meningkatkan peranserta masyarakat pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Drs. Josef Riwu Kaho, MPA, partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang memegang tampuk pemimpin untuk masa berikutnya (2002:112).

Dalam pembahasan yang sama Drs. J.R. Kaho, MPA (2002:113) mengemukakan ada beberapa pengertian mengenai partisipasi masyarakat menurut Bintoro Tjokoramidjojo, pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu negara.

Sementara Katz menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, disamping faktor-faktor tenaga terlatih, biaya informasi, peralatan dan kewenangan yang sah. Sedangkan menurut Arbi Sanit apabila kita berbicara mengenai pembangunan sesungguhnya yang diperbincangkan ialah keterlibatan keseluruhan masyarakat sebagai sistem terhadap masalah pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang : Prakarsa partisipasi yang datangnya dari atas (*with initiative coming from top down*) berarti partisipasi yang dimobilisasi oleh atasan. Sedangkan prakarsa partisipasi yang datangnya dari bawah (*with initiative from the bottom up*) adalah partisipasi yang mandiri.

- a. Perlu juga dipertimbangkan, apa yang menjadi pendorong orang berpartisipasi? Apakah mereka itu berpartisipasi karena paksaan atau atas dasar sukarela.
- b. Apakah partisipasi yang dilakukan itu jalurnya melalui struktur formal atau informal apakah melalui struktur yang begitu kompleks atau sederhana.
- c. Apakah pada dasarnya partisipasi itu dilakukan melalui saluran individu atau kelompok, secara langsung atau melalui individu secara langsung atau perwakilan.
- d. Apakah kelangsungan dan ketergantungan partisipasi itu dapat dipertahankan.
- e. Apakah lingkungan partisipasi itu terbatas lebih luas, apakah merupakan keterlibatan rutin atau insidental saja?
- f. Menyangkut kewenangan (dalam arti empowerment) : penting dalam berpartisipasi.

Selain apa yang telah disebutkan diatas, perlu diperhatikan pula faktor-faktor lingkungan dan kemasyarakatan.

Kedua faktor tersebut perlu dianalisa karena mempunyai dampak yang penting terhadap keberhasilan partisipasi dalam suatu proyek. Adapun ukuran keberhasilan partisipasi itu menyangkut beberapa faktor, yaitu faktor fisik dan faktor biologic, faktor ekonomis, faktor politic, faktor social, faktor kebudayaan dan faktor histories.

Konsep Masyarakat

Istilah masyarakat merupakan hal yang sering kali dijumpai dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dalam suatu ikatan Negara. Namun arti dari istilah masyarakat mendapat sambutan/tanggapan yang berbeda-beda dari para ahli dengan sudut pandang masing-masing. Menurut (Sumodiningrat,1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sating terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan dalam. (Kartasasmita, 1996).

Konsep Pembangunan

Para ahli banyak menggunakan berbagai istilah dalam mendefinisikan pembangunan. Antara lain dengan menggunakan kata modernisasi, perubahan sosial (*sosial change*), development, pertumbuhan, (*growth*) dan lain sebagainya.

J.W. Schoorl (Taliziduhu,1986:1-3), mengatakan bahwa istilah pembangunan dalam kaitannya dengan modernisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau semua aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Menurut I. Nyoman Beratha (1982:65) bahwa pembangunan itu tidak lain adalah satu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norms-norms tertentu. Perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi slam, manusia dan sosial budaya inilah yang sekedar bermakna ekonomi dan industrialistis saja. Ada pula yang mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan yang lainnya dipandang lebih bernilai.

Konsep Pembangunan Desa/Kampung

Istilah pembangunan desa sering disebut pula dengan pembangunan masyarakat (community development), untuk pembangunan pedesaan, dan lain-lain istilah. Terlepas dari perbedaan penggunaan istilah tersebut, maka tak dapat disangkal bahwa berbicara tentang pembangunan desa, pada hakekatnya adalah berbicara tentang pembangunan masyarakat desa. Karena pada akhirnya semua program-program pembangunan desa itu tujuannya tidak lain adalah untuk perubahan atau perbaikan taraf hidup masyarakat desa. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka demikian pula dengan tulisan ini bahwa konsep pembangunan desa tidak dibedakan dengan

konsep pembangunan masyarakat desa, sehingga kedua istilah ini akan digunakan dalam tulisan ini.

Definisi atau rumusan yang banyak digunakan dalam rangka membicarakan pembangunan desa antara lain seperti yang dirumuskan oleh PBB bahwa : pembangunan desa adalah suatu proses, dengan usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa, dan memungkinkan mereka untuk memberi sumbangan secara penuh kepada kemajuan nasional

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan dan sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 1990:22).

Penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua barat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sukunder dan data primer. Data sukunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (library study), sedangkan data primer adalah data yang bersumber dari lapangan (field research). Study lapangan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh data data yang mengenai ojek yang diteliti dengan menggunakan teknik teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

yaitu mengadakhantanya jawab langsung kepada sejumlah informasi dan informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitan dengan objek penelitian.

c. Kuisisioner

Yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder), pada berbagai literatur baik berupa buku, makalah-makalah hasil penelitian serta berbagai sumber lain.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 75 orang yang terdiri dari:

- Tokoh masyarakat Distrik Bintuni
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Masyarakat sesuai profesi
 1. Pendidikan atau Guru
 2. Petani, Nelayan, Buruh, Tukang Ojek dan Karyawan Swasta
 3. Pendeta, Pastor, Ustad
 4. Ibu Rumah Tangga

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi anggota masyarakat desa dalam

pembangunan fisik maupun non fisik, mulai dari tahap pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, sampai evaluasi pembangunan. Dalam penelitian ini, penelitian memfokuskan pada :

1. Partisipasi dalam bentuk ide atau pemikiran dalam perencanaan pembangunan.
2. Partisipasi dalam bentuk tenaga.
3. Partisipasi dalam bentuk uang atau materi .
4. Partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan di analisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan secara deskriptif tentang pelaksanaan partisipasi dalam bentuk ide atau pemikiran dalam perencanaan pembangunan, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang atau materi, partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan di Kampung Moskona Distrik Bintuni.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Moskona di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni

Berdasarkan hasil penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan dan kampung Moskona di Distrik Bintuni yaitu dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi pembangunan di kelurahan dan kampung Moskona di Distrik Bintuni adalah sebagai berikut ;

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kampung Moskona di Distrik Bintuni adalah sarana yang efektif untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dalam membuat atau memformulasikan rencana pembangunan yang sesuai dengan keinginan mereka. Dengan membuat program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat maka akan mendorong bagi masyarakat untuk mau melaksanakan program pembangunan tersebut.

Berikut ini akan dikemukakan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa dari 75 orang yang menjadi sampel informant ternyata 47 orang sering berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan kampung/desa, 19 orang kadang-kadang berpartisipasi, dan 9 orang atau tidak pernah berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni berada pada kategori yang cukup tinggi.

Kerelaan masyarakat kampung/desa didalam berpartisipasi dalam implementasi atau pelaksanaan program pembangunan kampung, maka kepada informan telah diajukan daftar pertanyaan yang secara operasional. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan atau implementasi rencana pembangunan tidak lain adalah keikutsertaan masyarakat desa didalam menunjang terlaksananya kebijakan atau rencana/program pembangunan kampung yang telah ditetapkan bersama. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan-sumbangan baik berupa uang lanai, bahan atau peralatan kerja, tenaga kerja dalam kegiatan gotong royong, serta sumbangan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya rencana pembangunan kampung yang telah ditetapkan.

Mengingat kondisi masyarakat kampung yang umumnya adalah masyarakat petani dan nelayan yang relatif kurang mampu, maka partisipasi mereka akan dilihat dari kerelaan dalam memberi salah satu atau beberapa sesuai dengan kesanggupan masyarakat.

Berikut ini akan dikemukakan hasil penelitian tentang kerelaan partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni. Dari hasil penelitian tentang kerelaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni terlihat bahwa dari 75 orang yang menjadi sampel informan; ternyata 52 orang sering berpartisipasi secara sukarela dalam pelaksanaan pembangunan kampung, 23 orang kadang-kadang berpartisipasi, dan tidak ada yang tidak pernah berpartisipasi secara sukarela dalam pelaksanaan pembangunan kampung di Distrik Bintuni.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni berada pada kategori yang cukup tinggi.

Berikut ini akan dikemukakan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni.

Dari hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni terlihat bahwa dari 75 orang yang menjadi sampel informan; ternyata 44 orang sering berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan kampung/desa, 22 orang kadang-kadang berpartisipasi, dan 8 orang tidak pernah berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan desa di Distrik Bintuni.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni berada pada kategori yang relatif kurang. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan/hasil pembangunan masih relatif kurang karena masih ada yang tidak mengambil bagian dalam mengawasi hasil-hasil pembangunan, untuk itu perlu adanya motivasi melalui kepemimpinan Kepala Desa dalam menimbulkan kesadaran masyarakat, karena hal ini juga sangat menentukan berhasilnya pembangunan di kampung.

Berikut ini akan dikemukakan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni.

Dari hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni terlihat bahwa dari 75 orang yang menjadi sampel informan; ternyata 42 orang sering berpartisipasi dalam mengevaluasi pembangunan kampung, 27 orang kadang-kadang berpartisipasi, dan 6 orang tidak pernah berpartisipasi dalam mengevaluasi pembangunan kampung di Distrik Bintuni.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni berada pada kategori relatif cukup baik.

Berdasarkan data pada hasil penelitian penulis mengklasifikasikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Distrik Bintuni.

Dari hasil penelitian penulis mengklasifikasikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni terlihat bahwa dari 75 orang yang menjadi sampel informant ternyata 42 orang Sering berpartisipasi dalam mengevaluasi pembangunan kampung, 27 orang kadang-kadang berpartisipasi, dan 6 orang tidak pernah berpartisipasi dalam mengevaluasi pembangunan kampung di Distrik Bintuni.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni berada pada kategori relatif cukup tinggi.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya memiliki keterampilan dan dapat mandiri untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan bahwa untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperanserta dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan diikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM melakukan pengorganisasian di tengah masyarakat. Belajar di tengah masyarakat, mentransfer pengetahuan melalui pelatihan kepada masyarakat dalam hal membuat perencanaan dan analisis secara bersama dengan masyarakat. Berbagai peran yang dimiliki pekerja LSM seperti

peran fasilitator yang memberikan stimulus dan juga peran-peran lainnya yang dimainkan membuat masyarakat semakin berdaya. Masyarakat yang tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum mulai dilatih dan hasilnya sangat baik karena mereka mulai bisa berbicara di depan orang banyak. Dengan menetap dan hidup bersama komunitas dampingan, pekerja LSM dapat mengetahui dan merasakan kebutuhan komunitas dan bersama mencari jalan keluarnya.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat pada umumnya adalah menggunakan pendekatan perencanaan bottom up yang sering dikenal dengan secara partisipatif dengan cita-cita dasar bahwa kegiatan pembangunan pada akhirnya dikembangkan dan dimiliki oleh masyarakat, hal ini berarti yang ikut serta adalah "orang luar" yakni para petugas lembaga-lembaga pembangunan masyarakat pada kegiatan masyarakat. Bukan sebaliknya masyarakat yang ikut serta pada kegiatan "orang luar". Artinya program pembangunan bukan dirancang oleh orang luar kemudian masyarakat diminta ikut melaksanakan, tetapi program dirancang oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh orang luar. (Jawaban informan dari LSM).

Dengan pelibatan masyarakat sebagai, perencana dan pelaksana dalam program pembangunan diharapkan tercapainya pemberdayaan masyarakat karena memperhatikan pembangunan manusia. Masyarakat memiliki akses (peluang/kesempatan) dan kontrol (kemampuan memberikan keputusan dan memilih) terhadap berbagai keadaan yang terjadi di seputar kehidupannya. Jadi diupayakan untuk mengorganisir segenap kesadaran kolektif, potensi dan sumber daya (termasuk sumberdaya manusia, pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dimiliki suatu komunitas dalam rangka melaksanakan tindakan nyata untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas atau masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat diberikan daya atau kekuatan (power) untuk melaksanakan tindakan nyata dalam mengatasi masalah yang ada di sekitar kehidupannya. Setelah mendapatkan daya atau power ini, individu atau komunitas dapat menggunakannya untuk berbagai kebutuhan dasarnya dalam hidup dan kehidupannya.

Berikut ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian tentang peran serta masyarakat melalui lembaga pemberdayaan dalam implementasi kebijakan publik pada pelaksanaan pembangunan kampung di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni. Diharapkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam memotivasi masyarakat untuk berperanserta dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kampung di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni.

Dari hasil wawancara terlihat bahwa dari 75 orang informan yang berasal dari unsur masyarakat dan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kampung Moskona di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni 26 orang menyatakan sangat baik dalam berperan untuk melaksanakan pembangunan, 37 menyatakan baik dalam berperan untuk melaksanakan pembangunan, 27 menyatakan cukup baik dalam berperan untuk melaksanakan pembangunan, dan 10 menyatakan kurang berperan dalam melaksanakan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni

PENUTUP

Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kampung Moskona di Distrik Bintuni adalah sarana yang efektif untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dalam membuat atau memformulasikan rencana pembangunan yang sesuai dengan keinginan mereka. Dengan membuat program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat maka akan mendorong bagi masyarakat untuk mau melaksanakan program pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni. Dari 75 orang yang menjadi sampel informan; ternyata 47 orang sering berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, 19 orang kadang-kadang

berpartisipasi, dan 9 orang atau tidak pernah berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni berada pada kategori yang cukup tinggi.

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni berada pada kategori yang cukup tinggi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni terlihat bahwa dari 75 orang yang menjadi sampel informan; ternyata 52 orang sering berpartisipasi secara sukarela dalam pelaksanaan pembangunan kampung, 23 orang kadang-kadang berpartisipasi, dan tidak ada yang tidak pernah berpartisipasi secara sukarela dalam pelaksanaan pembangunan kampung di Distrik Bintuni.
4. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan-sumbangan baik berupa uang tunai, bahan atau peralatan kerja, tenaga kerja dalam kegiatan gotong royong, serta sumbangan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya rencana pembangunan kampung yang telah ditetapkan.
5. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni berada pada kategori yang relatif kurang. Terlihat bahwa dari 75 orang yang menjadi sampel informan; ternyata 44 orang sering berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan desa, 22 orang kadang-kadang berpartisipasi, dan 8 orang tidak pernah berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan desa di Distrik Bintuni.
6. Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni. Dari 75 orang yang menjadi sampel informant ternyata 42 orang sering berpartisipasi dalam mengevaluasi pembangunan kampung, 27 orang kadang-kadang berpartisipasi, dan 6 orang tidak pernah berpartisipasi dalam mengevaluasi pembangunan kampung di Distrik Bintuni. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni berada pada kategori relatif cukup baik.
7. Berdasarkan data pada hasil penelitian tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan/kampung Moskona di Distrik Bintuni terlihat bahwa dari 75 orang yang menjadi sampel informant ternyata 42 orang sering berpartisipasi dalam mengevaluasi pembangunan kampung, 27 orang kadang-kadang berpartisipasi, dan 6 orang tidak pernah berpartisipasi dalam mengevaluasi pembangunan kampung di Distrik Bintuni. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam, pembangunan kampung Moskona di Distrik Bintuni berada pada kategori relatif cukup tinggi.
8. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya memiliki keterampilan dan dapat mandiri untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.
9. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat pada umumnya adalah menggunakan pendekatan perencanaan bottom up yang sering dikenal dengan secara partisipatif dengan cita-cita dasar bahwa kegiatan pembangunan pada akhirnya dikembangkan dan dimiliki oleh masyarakat.

Saran

1. Perlu adanya motivasi melalui kepemimpinan Kepala Desa dalam menimbulkan kesadaran masyarakat, karena hal ini juga sangat menentukan berhasilnya pembangunan di kampung Moskona di Distrik Bintuni .
2. Hendaknya pemerintah lebih menunjang keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat

dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya memiliki keterampilan dan dapat mandiri untuk ikut serta dalam pembangunan di Distrik Bintuni.

3. Disarankan agar lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan untuk lebih dapat meningkatkan peranannya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Distrik Bintuni.
4. Diharapkan agar masyarakat lebih dapat lebih meningkatkan peran sertanya berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Distrik Bintuni.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1997, "Prosedur Penelitian," Rineka Cipta, Bandung.
- Bhenjamin, H. 2003, Tinjauan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Kemungkinan Revisi U U No. 22 Tahun 1999, Jakarta, Makalah..
- Beratha. I. Nyoman, 1982, Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bryant, C. dan L.G, White. 1999, Managing Development, Westview Press Inc., Colorado.
- Cohen and Uphoff. 1977, Feasibility And Application Of Rural. Development Participate, Cornell University, Ithaca.
- Hartoyo, dkk., 1986. Pembangunan Masyarakat Desa. Modul UT. Karunika, Jakarta.
- Kaho Josef Riwuh, 2003. Prospek Otonomi Daerah rah di Negara Republik Indonesia. PT. Rajawali Graf-indo Persada, Jakarta.
- Kartasmita Ginanjar, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan) Jakarta : PT. Pustaka. SIDESINDO.
- Khairudin H., 1992. Pembangunan Masyarakat. Liberti, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1979. Pembangunan dan Partisipasi, BP. Gramedia, Jakarta.
- Koswara, E. 2001., Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Jakarta, Bina Aksara.
- Lysen , A, 1985. Individu dan Management, Tanpa Penerbit.
- Moleong, L, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mulandar, Surya dan Juni Thamrin, 1996, Dehumanisasi Anak Marginal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan, Diterbitkan atas kerja sama Yayasan AKATIGA-Gugus Analisis Bandung.
- Muslimin A., Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung, Alumni, 1983.
- Ndraha, T. 2000, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineke Cipta, Jakarta.
- _____, 1982, Partisipasi Masyarakat Desa di Beberapa Desa. Bina Aksara, Jakarta.
- Purwadarminta, W.J.S. 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1997, Program PBB Dalam Pembangunan Daerah Suatu Pengenaan : Perencanaan Sub-Nasional, BPA-UGM, Yogyakarta.
- Saparin S., 1986. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarundajang, 1999, Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara, Jakarta, Pustaka Sinar.
- Slamet, Y. 1992, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Soekanto Soerjono., 1990 Sopsiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumale, A., 2003, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Propinsi Papua, Jakarta, Gramedia.
- Tjokroamidjojo, B. 1992, Adminisfrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. 1995, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
- Uphoff N.T. dan W.F, Ilchman. 1992, The Political Economy Of

Development, Me Graw-Hill Book Company, Inc., New York.
United Nation Development Program, 1997. "Dokumen Prinsip-prinsip Good Governance," PT.
Sinar Abadi, Jakarta

Sumber-Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, November, 2005.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.